

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK POLITIK DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA KANCEBUNGI, KECAMATAN
MAWASANGKA, KABUPATEN BUTON TENGAH)**

Oleh:

Arsad¹, Eka Suab², Muh. Nasir³
Universitas Halu Oleo, Arsadin1996@gmail.com, Kendari, Indonesia
Universitas Halu Oleo, ekasuab1966@gmail.com, Kendari, Indonesia
Universitas Halu Oleo, nasirmuh19@gmail.com, Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Arsad (C1D7 16 005) Faktor Faktor Penyebab Konflik Politik dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah). Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Eka Suaib, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Muh. Nasir, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik politik dalam Pemilihan Kepala Desa Kancebungi Tahun 2018; (2) Bagaimana penyelesaian konflik pemilihan kepala Desa Kancebungi Tahun 2018.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kancebungi Tahun 2018; (2) Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik politik pemilihan kepala Desa Kancebungi tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan kepala Desa Kancebungi yang telah ditentukan sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor yang menyebabkan adanya konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Kancebungi Tahun 2018 disebabkan oleh faktor kepentingan politik dan faktor fanatisme pendukung, ini dilakukan keluarga dekat dari calon yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa; (2) penyelesaian konflik pemilihan kepala Desa Kancebungi Tahun 2018 tidak terselesaikan disebabkan oleh tidak adanya pengakuan dari masyarakat dan tidak adanya kompromi pemerintah Desa dengan masyarakat setempat.

Kata kunci: faktor-faktor penyebab konflik politik

ABSTRACT

Arsad (C1D7 16 005) Factors Causing Political Conflict in Village Head Elections (Case Study of Kancebungi Village, Mawasangka District, Central Buton Regency). Supervised by Prof. Dr. H. Eka Suaib, M.Si as supervisor I and Dr. Muh. Nasir, S.Sos, M. Si as supervisor II.

The problems in this research are: (1) what factors cause political conflict in the 2018 Kancebungi Village Head Election; (2) How to resolve the 2018 Kancebungi Village head election conflict.

The objectives of this study are: (1) To determine the factors that cause political conflict in the Village Head Election in Kancebungi Village in 2018; (2) To find out how to resolve political conflicts in the election of the head of Kancebungi Village in 2018. This type of research is qualitative research. The subjects in this study were 15 people who participated in the election for the head of Kancebungi Village. Data collection techniques are observation, interviews, and literature study. The data analysis technique used qualitative analysis methods.

The results of the study show that: (1) the factors that led to political conflict in the election of the Village Head in Kancebungi Village in 2018 were due to factors of political interests and supporting fanaticism factors, this was carried out by the close family of candidates who participated in the Village Head Election; (2) conflict resolution for the election of the head of Kancebungi Village in 2018 was not resolved due to the absence of recognition from the community and no compromise between the Village government and the local community.

Key words: factors causing political conflict

PENDAHULUAN

Istilah konflik dalam ilmu politik acap kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Masing-masing berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama. Namun, guna mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama itu kekerasan bukan satusatunya cara. Pada umumnya kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif yang terakhir. Dengan demikian, konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan.

Menurut Ralf Dahrendorf dalam suaib melihat masyarakat terdiri dari dua kelas berdasarkan pemilikan kewenangan (authority) yaitu kelas yang memiliki kewenangan (dominasi) dan kelas yang tidak memiliki kewenangan (subjeksi) dan bahwa masyarakat terintergrasi karena adanya kelompok kepentingan dominan yang menguasai masyarakat.

Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Huru-hara (*riot*), kudeta, pembunuhan atau sabotase yang berdimensi politik (terorisme), pemberontakan, dan separatisme, serta revolusi merupakan sejumlah contoh konflik yang mengandung kekerasan.

Konflik yang tak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan Negara dan. Mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Adapun

contoh konflik yang tak berwujud kekerasan, yakni unjuk-rasa (demonstrasi), pemogokan (dengan segala bentuknya), pembangkang *gansipil* (*civil disobedience*), pengajuan petisi dan protes, dialog (musyawarah), dan polemik melaluisurat kabar.

Sementara itu, konflik tidak selalu bersifat negatif seperti diduga banyak orang. Apabila ditelaah secara saksama, konflik mempunyai fungsi positif, yakni sebagai pengintegrasi masyarakat dan sebagai sumber perubahan. Pengajuan buah pikiran, pendapat, dan tuntutan kebijakan yang berlainan ataupun yang bertentangan merupakan mekanisme guna menghasilkan pemikiran baru yang lebih mendekati kebenaran atau kebijakan yang lebih baik. Semua kreativisme inovasi, dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat muncul dari konflik yang terjadi antara kelompok dan kelompok, antara individu dan individu, serta antara emosi dan emosi dalam diri individu.

Walaupun demikian, ada sejumlah konflik yang dari sifatnya beraspek politik karena langsung melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini, yakni konflik antar kelompok masyarakat yang satu dan kelompok masyarakat yang lain dalam usaha mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dikuasai pemerintah; atau kegiatan kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah maupun sejumlah tokoh militer yang didukung dengan sejumlah golongan untuk melakukan kudeta atas pemerintah yang berkuasa.

Berkaitan dengan uraian di atas dapat dikemukakan contoh berikut. Para petani padi melalui organisasi yang dibentuk menuntut kepada pemerintah agar harga gabah dinaikkan dan, harga sarana produksi pertanian dikendalikan sehingga pendapatan mereka meningkat. Sementara itu, para pegawai negeri dan masyarakat perkotaan menuntut agar harga beras dikendalikan karena penghasilan mereka terbatas. Dalam menghadapi tuntutan yang bertentangan itu, pemerintah harus membuat keputusan yang adil.

Jadi, konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

Yang dimaksud dengan pemerintah meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya, secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik.

Faktor Penyebab Konflik Politik

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. Konflik politik itu mencakup kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. Yang dimaksud dengan kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota (Suaib, 2018).

Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme. Kemajemukan horisontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan. Kelompok masyarakat yang tinggal di kota, misalnya, menghendaki harga beras dan bahan bakar minyak dikendalikan oleh pemerintah, dan kalau perlu disubsidi oleh pemerintah, sedangkan masyarakat yang tinggal di desa menghendaki agar pemerintah membiarkan harga-harga beras dan bahan bakar minyak berkembang sesuai dengan mekanisme pasar. Sebaliknya, pemerintah hanya berperan dalam menciptakan dan menegakkan aturan main yang adil.

Kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan horisontal dan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan politik. Hal ini disebabkan adanya fakta terdapat sejumlah masyarakat yang menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan-perbedaan masyarakat ini menimbulkan konflik, apabila kelompok tersebut memperebutkan sumber yang sama, seperti kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan kehormatan.

Konflik politik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik politik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh "titik kemarahan" pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horisontal merupakan kondisi yang harus ada (*necessary condition*) bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai, (*sufficient condition*) untuk menimbulkan konflik.

Tipe - Tipe Konflik Politik

Konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe. Kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Yang dimaksud dengan konflik positif ialah konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka yang lain. Tuntutan akan perubahan yang diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga-lembaga itu merupakan contoh konflik positif. Sebaliknya, konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.

Kategorisasi ini mengandung kelemahan. Apabila mayoritas masyarakat memandang lembaga dan struktur yang ada tidak mementingkan kepentingan umum maka konflik yang disalurkan melalui mekanisme politik justru dipandang sebagai konflik yang negatif. Sebaliknya, tindakan, yang menentang sistem yang tidak mencerminkan kepentingan umum dipandang sebagai konflik yang positif.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu konflik bersifat positif atau negatif sangat bergantung pada persepsi kelompok yang terlibat dalam konflik, terutama pada sikap masyarakat umum terhadap sistem politik yang berlaku. Dalam hal ini, Yang menjadi patokan untuk menentukan suatu konflik bersifat positif atau negatif, yakni tingkat legitimasi sistem politik yang ada. Hal ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat umum terhadap sistem politik Yang berlaku.

Konflik yang dianggap positif dalam masyarakat ini acap kali justru konflik yang disalurkan melalui cara-cara di luar struktur kelembagaan yang ada karena dianggap lebih efektif. Kategorisasi itu tentu lebih bersifat analitis (lebih kurang) daripada *pengelompokan secara hitam putih*. Sebab dalam kenyataannya, konflik dan dukungan masyarakat - terhadap sistem yang ada (struktur kelembagaan) tidak sesederhana itu.

Konflik Dan Pengaturan Konflik

Seperti sudah dijelaskan bahwa konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tak merata, sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak akan dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Oleh karena itulah, para penganut teori konflik ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri. Karena is melekat pada masyarakat itu sendiri, maka konflik tidak akan dapat dilenyapkan. Yang dapat dilakukan oleh manusia anggota masyarakat adalah mengatur konflik (conflict regulation) iw agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung secara kekerasan.

Dahrendorf melihat proses konflik itu dari segi intensitas dan sarana yang digunakan dalam konflik. Intensitas diartikan sebagai tingkat keterlibatan kontestan dalam artian waktu, tenaga, dana dan pikiran. Sedangkan kekerasan (violence) diartikan sebagai sarana yang digunakan oleh para kontestan konflik dalam memperjuangkan kepentingan mereka, apakah menggunakan sarana kekerasan fisik atau tidak. Dalam hal ini Dahrendorf cenderung melihat violence tidaknya suatu konflik sebagai variabel terpengaruh (dependent variabel). Faktor-faktor yang mempengaruhi violence tidaknya suatu konflik adalah kondisi organisasi, superimposed atau plural dalam pemilikan kewenangan (klas), superimposed atau plural dalam status sosial dan ekonomi, mobilitas atau immobilitas klas, dan pengaturan konflik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi intens tidaknya suatu konflik adalah kondisi klas organisasi, superimposed atau tidak dalam konflik klas, superimposed atau tidak dalam kelompok klas, superimposed atau tidak dalam status sosial dan ekonomi, dan terbuka tidaknya klas tersebut.

Mengapa konflik tidak dapat diselesaikan ? Bagi Dahrendorf konflik bersifat dialektika. Artinya, konflik yang terjadi antara suatu thesis dengan antithesis lewat pengaturan konflik yang melahirkan synthesis; namun synthesis itu pada gilirannya akan berubah menjadi thesis yang akan menghadapi antithesis sehingga lewat pengaturan konflik akan dilahirkan synthesis baru, demikian seterusnya. Perbedaan Dahrendorf dengan Marx juga terletak pada hal ini.

Bagi Dahrendorf konflik itu akan terus menerus ada selama masyarakat itu ada; sedangkan komunis telah terbentuk. Seperti diketahui salah satu eskatologi Marx adalah masyarakat komunis yang tanpa klas karena klas tidak ada lagi maka konflik juga akan hilang dengan sendirinya. Yang dimaksud dengan konsiliasi adalah pengaturan konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan proses pengambilan keputusan diantara para kontestan mengenai persoalan-persoalan yang mereka

pertentangan. Dalam kehidupan politik, lembaga-lembaga seperti itu adalah antara lain badan-badan perwakilan rakyat (parlemen) atau semi parlementer dalam mana berbagai kelompok kepentingan atau wakil-wakil mereka sating bertemu satu sama lain untuk mewujudkan (to carry on) konflik mereka melalui cara-cara damai dan terpola. Bentuk pengaturan konflik konsiliasi ini akan dapat berfungsi secara efektif apabila sekurangnya keempat faktor berikut terpenuhi.

Pertama, lembaga-lembaga itu harus bersifat otonom yang berkewenangan membuat keputusan tanpa campur tangan dari pihak luar. *Kedua*, kedudukan lembaga tersebut harus bersifat monopolitik dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian. *Ketiga*, peranan lembaga-lembaga tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga' berbagai kelompok kepentingan yang berkonflik merasa terikat pada lembaga tersebut dan segala keputusan yang mengikat pihak-pihak yang bertentangan tersebut, dan akhirnya keempat, lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokrasi yaitu semua pihak yang berkonflik harus didengarkan dan diberi kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapatnya sebelum keputusan diambil.

Jika bentuk pengendalian meditasi juga tidak efektif, maka ada satu cara lain yaitu arbitrase. Yang dimaksud dengan bentuk pengaturan konflik arbitrase adalah pengaturan konflik yang melibatkan pihak ketiga tetapi keputusan pihak ketiga (arbitrator) mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Hadirnya pihak ketiga atau arbitrator itu bisa karena hasil kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik ; bisa pula karena harus menerima kehadiran pihak ketiga.

Demokratisasi Desa Melalui Pemilihan Kepala Desa

Demokratisasi Desa setidaknya harus memperhatikan empat hal berikut. Pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di Desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk Desa yang telah berlangsung lama. Bahkan, banyaknya Desa-desanya di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Negara Republik Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah sangat lama terbentuk. Apabila nasionalisme atau perasaan kebangsaan di tingkat Negara terbentuk secara imajiner, seperti dinyatakan oleh seorang antropolog, perasaan sebagai sesama orang sedesa tumbuh secara empiris dan personal, yaitu hasil dari pergaulan sehari-hari termasuk dari hubungan kekerabatan. Hubungan-hubungan tersebut seringkali membentuk pola sikap dan tata cara pergaulan. Secara umum misalnya hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, saudara dekat dengan saudara jauh, berkerabat atau tidak berkerabat. *Kedua*, hubungan Desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Bagi Desa, tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-

waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati. Ruang bagi Desa sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri.

Keterikatan pada ruang tersebut bukan semata-mata bersifat ekonomis, yakni sebagai sumber nafkah, melainkan tidak jarang dibarengi dengan perlakuan ruang sebagai sesuatu yang bernyawa dan hidup. Dari model keterikatan semacam itulah muncul kearifan lokal (local wisdom) yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat Desa, penghargaan terhadap tanah, udara, dan air. Berkait dengan itu, ketiga, pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang, menciptakan atau pola sosio budaya Desa yang khas.

Kehidupan Desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama, sekaligus digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintasan sejarah, dan terikat pada ruang. Setiap Desa memiliki adat-istiadat, sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda, dan sejarahnya masing masing. Misalnya, Banyak Desa yang masih mempergunakan trah atau keturunan sebagai rujukan penilaian siapa yang layak menjadi Kepala Desa. Keempat, solidaritas yang terbentuk di Desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kolektivistik.

Dalam bentuk solidaritas semacam itu, masyarakat Desa menjadi suatu kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong. Masyarakat Desa sebagai subyek atau aktor dapat bertindak sebagaimana individu. Dalam cara pandang modernisasi-pembangunan model orde baru, sifat-sifat Desa yang semacam itu dilihat sebagai penghambat pembangunan.

Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada moment ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 6 tahun ke depan. Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupan politik kita sekarang. Pilpres, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan Pemilu Legislatif. Tak ketinggalan adalah Pilkades. Begitu menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dalam tentang budaya pemilihan kepala desa ini.

Dalam pelaksanaannya begitu mendetail keterkaitan antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Sehingga, perlu ketelitian dari tiap calon pemilih dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilihnya tersebut. Namun pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya. Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa dari pada saat

pemilu pemilu yang lain. Pengenalan atau sosialisasi terhadap calon-calon pemimpin bukan lagi mutlak harus lagi penting.

Kedekatan pribadi, akan sering kali banyak dipakai oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya. Di sini unsur nepotisme masih begitu kental membudaya. Demikian juga dengan kolusi, hubungan baik dalam berbagai posisi juga banyak dijadikan sebagai unsur penentuan hak pilih. Demikian juga dengan unsur Money politik yang sering dijadikan iming-iming dorongan dalam pemilihan. Hal demikian akan menjadikan para calon harus mengeluarkan biaya yang begitu besar. Persaingan antar calon sering kali juga terjadi dengan berlebihan. Kalau demikian ini yang terjadi usaha penghapusan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) akan terasa sulit diwujudkan. Di sini pendidikan politik perlu dikembangkan. Kerelaan berkorban untuk kepentingan desa yang juga merupakan bagian dari bangsa dan negara ini tentu perlu diwujudkan. Tidak semua pengorbanan harus diukur dengan kontribusi uang. Kalau budaya maney politik di tingkat desa bisa dikikis, tentu sedikit demi sedikit di tingkat yang lebih atas hingga pemilihan presiden akan dapat diwujudkan proses pemilihan pelaksana pemerintahan yang jujur dan adil.

Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan. Semula kita hanya mengenal pesta demokrasi secara langsung berupa Pilkades ini. Sehingga pelaksanaannya banyak keluar dari etika dan norma politik. Money politic dengan berbagai bentuknya sulit sekali dihindari. Kemudian sejak era reformasi masyarakat dibudayakan dengan pemilihan pimpinan dengan cara pemilihan langsung. Dengan adanya pilkada diharapkan masyarakat dapat terlatih untuk peduli kepada pemimpinnya, serta sadar terhadap apa, siapa, dan bagaimana pemimpin yang akan di pilih nanti.

Hal yang menarik menjelang pilkades saat ini yakni adanya isu putra daerah. Akhir-akhir ini putra daerah dirasa menjadi salah satu syarat pendukung yang perlu dimiliki oleh seorang calon pemimpin desa. Sehingga tidak mengherankan jika seorang calon kepala desa menambahkan keterangan putra daerah pada setiap kampanyenya. Berdasarkan dari fenomena tersebut maka perlu pemikiran secara jernih tentang apa arti dari putra daerah itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan putra daerah adalah penduduk asli dari desa setempat.

Menurut Eep Saefullah Fatah dalam salah satu kolom politiknya, ada 4 jenis dari definisi putra daerah, yakni pertama, putra daerah geologis atau biologis, yaitu seseorang yang dilahirkan dari daerah tersebut. Kategori ini dibagi menjadi, yakni seseorang yang dilahirkan di desa tersebut yang salah satu atau kedua orang tuanya berasal dari desa tersebut dan mereka yang tidak lahir di desa tersebut tapi memiliki orang tua yang berasal dari desa

tersebut. Putra daerah ini terlintas hanya memiliki kepentingan pragmatis dengan daerah asalnya. Mereka menggunakan daerah hanya sebagai basis pemenuhan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Namun sebaliknya daerah itu pun sedikit banyak memperoleh keuntungan politik dan ekonomi dari mereka. Keempat, yakni putra daerah sosiologis, yaitu mereka yang bukan saja memiliki keterkaitan genealogis dengan daerah tersebut tetapi juga hidup, tumbuh, dan besar serta berinteraksi dengan masyarakat daerah tersebut. Mereka menjadi bagian sosiologis dari daerah tersebut.

Dalam pemilihan pemimpin desa yang harus diutamakan ialah tentang kapabilitas dari calon-calon pemimpin tersebut. Suatu desa tidak hanya dapat dipimpin oleh pemimpin yang bermodalkan kefiguritan namun cacat secara intelektual, moral dan sosial. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang yakni seseorang memiliki akseptabilitas namun ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakatnya dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat.

Dalam Harjudin (Maswadi Rauf :33) konsensus dibagi menjadi tiga cara konsensus politik, pertama, dilakukan dengan jalan pemilihan umum (pemilu) terutama yang terjadi antara partai politik, kedua, yang banyak digunakan dalam mencapai consensus politik adalah cara musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, ketiga pemungutan suara (voting). Cara ketiga ini merupakan jalan terakhir untuk mencegah berlarut-larutnya musyawarah dan jalan buntu.

Pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai suatu proses pemberian suara dalam rangka pemilihan dan untuk dapat menghasilkan pemilihan yang murni dan bersih dalam hal ini tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa, pada lokasi tersebut dapat memperoleh data yang akurat untuk keperluan informasi penelitian karena Desa Kancebungi merupakan salah satu desa peserta Pemilihan Serentak Kepala Desa tahun 2018 di Kabupaten Buton Tengah.

Menurut Arikunto 2000:112 mengemukakan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil seluruhnya hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya apabila subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih dengan mempertimbangkan tingkat homogenitas populasi. Subjek dalam penelitian ini adalah

masyarakat yang ikut dalam Pemilihan Serentak Kepala Desa Kancebungi tahun 2018 sebanyak 894 orang.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan pemilihan kepala Desa telah diatur dalam peraturan pemerintah daerah kabupaten masing-masing, begitu juga dengan pemilihan Kepala Desa Kancebungi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan desa Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang petunjuk teknik perencanaan pembangunan desa. Tahapan-tahapan pemilihan kepala desa kancebungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah :

Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan

1. Tahapan pembentukan panitia pemilihan;
2. Tahapan pendataan daftar pemilih
3. Tahapan penjaringan bakal calon dan penyeleksian calon kepala desa
4. Tahapan kampanye calon kepala desa.
5. Tahapan pemungutan suara
6. Tahapan penetapan calon terpilih

Pemilihan kepala desa yang berlangsung di Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2018 dengan beberapa tahapan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh panitia pemilihan dengan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan tata cara pemilihan.

Pemilihan Kepala Desa Kancebungi dimulai dengan membentuk panitia pemilihan. Panitia pemilihan tidak terikat dengan pemerintahan administrasi negara seperti pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten ataupun bersifat independen. Panitia pemilihan bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa yang bersaing dalam proses pemilihan kepala desa.

Panitia di bentuk melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus atas pertimbangan kehendak masyarakat desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa yang bertugas untuk menjalankan proses tahapan- tahapan pemilihan Kepala Desa Kancebungit pada tahun 2018. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kancebungi berjumlah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat desa yakni :

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Pengurus perangkat desa
3. Tokoh Masyarakat

Panitia pemilihan yang terpilih kemudian dilaporkan kepada kepala daerah untuk disahkan dan dilantik oleh kepala daerah untuk mendapatkan pelatihan dan pengarahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah melalui birokrasi pemerintahan kabupaten Buton Tengah. Panitia pemilihan Kepala Desa Kancebungi di bentuk pada tanggal 01 Agustus tahun 2018 yakni

1. Ketua Panitia: La Nao
2. Sekretaris : Suriadi
3. Bendahara Panitia Imbang : Aisa
4. Anggota Panitia: Sarufia

Dalam melaksanakan proses pemilihan kepala desa, maka panitia pemilihan dibagi atas beberapa struktur jabatan dan tugas masing-masing, yakni: Ketua panitia, sekretaris dan anggota dan bendahara. Agar proses pemilihan kepala desa berjalan dengan maksimal, maka pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah memberikan sumbangan anggaran dana sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dana tersebut termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah. Adapun dana tersebut di pergunakan untuk administrasi Kesekretariat, Persiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa, Transportasi Panitia dan Biaya rokok, minum ataupun biaya upah pekerja yang membantu Panitia Pemilihan.

Pemilihan Serentak Kepala Desa Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018 di Desa Kancebungi yang diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu Baak Sahiruddin dan Bapak La Ane. Adapun yang memenangkan pilihan ini sebagai berikut

Tabel 4.1 Perolehan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2018 Desa Kancebungi

Perolehan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2018 Desa Kancebungi		
Calon Kades	Suara Sah	Presentase (%)
Sahiruddin	294	51,2%
La Ane	180	31,3%
Suara Batal	100	17,5%
Jumlah	574	100%

Sumbe data: Data Pilkades Desa Kancebungi Februari 2018

Hasil pemiliha kepala Desa serentak di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 adalah sebagai salah satu persyaratan dalam menjadi seorang pemimpin di Desa Kancebungi, dengan

ini kemenangan dirai bapak Sahurudin dengan memperoleh suarah 294. Sedangkan La Ane mengalami kekalahan dengan memperoleh suarah 180.

Penyebab Konflik Politik

Sebelum membahas faktor penyebab konflik, maka akan diuraikan terlebih dahulu bentuk konflik. Ada 2 jenis bentuk konflik yakni konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki perbedaan strata atau tingkatan dalam masyarakat. Konflik ini banyak terjadi antara pemerintah dengan masyarakat ataupun konflik antara perusahaan dengan tenaga kerja di suatu perusahaan. Sementara konflik horizontal adalah konflik antara sesama warga anggota masyarakat. Konflik vertikal berupa adanya sekelompok masyarakat Kencebungi yang melakukan pelemparan batu kepada rumah calon kepala desa terpilih.

Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di antara orang atau golongan yang memiliki kesamaan derajat sosial, kelas sosial, ataupun golongan yang sama dalam masyarakat. Konflik ini sering terjadi dalam masyarakat, biasanya perbedaan pendapat bisa menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal. Beberapa konflik horizontal bisa diselesaikan tanpa campur tangan pihak lainnya, namun banyak pula konflik horizontal yang perlu diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Biasanya terjadi pelanggaran hukum di dalamnya.

Konflik horizontal disebabkan oleh benturan kepentingan antara sesama pendukung calon kepala desa. Di lokasi penelitian, tidak ditemukan konflik etnik dan agama. Hal itu disebabkan di lokasi penelitian, hanya satu jenis etnis, yakni etnis Buton dan agama, yakni agama Islam. Dengan demikian, maka bentuk konflik vertikal yang perlu mendapatkan penanganan pada masa-masa yang akan datang. Hal itu disebabkan karena di desa saat ini sudah menjadi arena dan lokus dari tumbuhnya demokrasi. Dalam situasi seperti itu, posisi Kepala Desa sebagai elite penting di desa menempati posisi yang sangat penting. Karena itu, para elite di desa, sadar bahwa dengan kedudukan sebagai kepala desa sangat menentukan dalam demokrasi di desa. Jadi, jika salah satu calon kepala desa yang dinyatakan kalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka 'diam-diam' melakukan perlawanan karena sakit hati atas kekalahan tersebut.

Faktor penyebab konflik adalah adanya perbedaan individu dan kelompok dikarenakan perbedaan pendapat, adanya perselisihan mengenai kepentingan ekonomi, sosial, hukum, maupun politik, Kemajemukan, Benturan Kepentingan Politik dan Fanatisme Berlebihan

Penyelesaian Konflik

Dalam menyelesaikan suatu konflik, kembali harus dilihat bagaimana cara atau proses para pihak dalam bersungguh-sungguh dan dengan semangat bersama untuk mencapai perdamaian.

1. Pengakuan

Dalam menyelesaikan konflik terkadang perlu pengakuan dari tokoh-tokoh terkait atau pemerintah untuk mendamaikan pihak yang berkonflik. Dengan tidak adanya pengakuan dari tokoh-tokoh atau pemerintah setempat maka konflik tersebut sampai sekarang masih terus ada. Pihak-pihak yang berkonflik ingin sekali untuk menyelesaikan konflik tersebut. Akan tetapi tidak ada wadah untuk menyelesaikan konflik dalam pemerintah desa.

2. Kompromi

Kompromi merupakan upaya untuk memperoleh kesepakatan diantara dua pihak maupun kelompok yang saling berbeda pendapat atau yang pihak yang berselisih. Kompromi juga dapat dikatakan sebagai konsep untuk mendapatkan melalui kompromi, kompromi dilakukan agar perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat dapat terselesaikan dengan pembuatan kesepakatan yang baru. Kesepakatan dalam kompromi adalah kesepakatan yang dianggap paling menguntungkan dua belah pihak maupun kelompok atau tidak satu pihak yang dirugikan kesepakatan yang disahkan.

3. Konsiliasi

Mengenai konsiliasi, pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat terdapat keterlibat pihak ke-3 yang netral yang tidak memihak yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa mereka, yaitu konsiliator. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa konsiliator pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar pada mediator, mengingat ia dapat mendorong atau memaksa para pihak untuk lebih kooperatif dalam menyelesaikan sengketa mereka. Konsiliator pada umumnya menawarkan alternatif-alternatif penyelesaian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak untuk memutuskan. Jadi hasil konsiliasi, konsiliator dengan cara mengintervensi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan informan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya konflik politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kancebungi Tahun 2018 disebabkan oleh faktor kepentingan politik dan faktor fanatisme pendukung, ini dilakukan keluarga dekat dari calon yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa.

Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan pernyataan informan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penyelesaian konflik pemilihan kepala Desa Kancebungi Tahun 2018 tidak terselesaikan disebabkan oleh tidak adanya pengakuan dari masyarakat dan tidak adanya kompromi pemerintah Desa dengan masyarakat setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta,
- Fatar, Eep Saefullah. *Teori Negara dan Negara Orde Baru* : Penjajakan Melalui Poulatzas dan evans, Prima, Desember 1994
- Fishet, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik. Jakarta : Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The Britisth Conucil
- Maswadi, Rauf. 2001. *Consensus Politik dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departaman Pendidikan Tinggi
- Natsir, Moh. 2005. *Metode Penelitian. Cetakan keenam*. Bogor :Ghalia Indonesia
- Novri, Susan. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontenporer*. Jakarta : Kencana
- Nurcholis, Hanafi. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Earlangga
- Romlah, S. 2017. *Analisis Potensi Penyebab Konflik pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang*. Vol.5. No. 01. Diakses Tanggal 25 November 2018.
- Sarwono, wirawan. 1976. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta : Bulan Bintang
- Sinegar, S.S. 2014. *Konflik Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Sayur Mahincat Tahun 2011*. Vol. 6.No.1 diakses Tanggal 25 November 2018.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grapindo
- Suaib, E., Jusoff, K., Abdullah, M. Z., & Suacana, I. W. G. (2017). The effect of the party's image relationship to voters' satisfaction and voters' loyalty. *International Journal of Law and Management.s*
- Suaib, Eka, et al. "The effect of the party's image relationship to voters' satisfaction and voters' loyalty." *International Journal of Law and Management* (2017).
- SUAIB, Eka, et al. The effect of the party's image relationship to voters' satisfaction and voters' loyalty. *International Journal of Law and Management*, 2017.
- Suaib, Eka. 2018. *Teori-Teori Politik. Kendari. Bahan Ajar, (Tidak Dipublikasikan)*.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widya Sarana
- Tuwudarmin. 2018 *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian* kendari : Literacy Institute
- Widjaja, A.W. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wirawan. 2010. *Konflik dan manajemen: Teori. Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Selemba Huma

